

PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2010-2015

Oleh :Elwy Soehandry. S
Email : elwyzackyy@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Election is a process by which voters choose people to fill certain political positions. Political positions vary from the President, representatives at various levels of government to the village head. The electoral system used in Indonesia is the principles of direct, public, free, confidential (overflow), as well as honest and fair. Election of the President, Legislative, and Regional Head directly for the purpose of choosing leaders directly and the people can determine the leaders they want more autonomy. The elections can not be separated from the participation of the community to participate in these elections. In Sub Tebing Tinggi voter participation rates in elections experiencing fluctuating numbers of voter participation in elections.

This research was conducted in September and December 2016. The purpose of this study was to determine the cause of the rise and fall participation number of voters on Election in District Tebing Tinggi District maritime Meranti from 2010-2015. The method used in this research is descriptive qualitative method, which in this study researchers tried to explain the causes of voter turnout fluctuated in Tebing Tinggi District of Kepulauan Meranti Regency Year 2010-2015. Data collection techniques in this study using the technique of in-depth interviews and documentation relevant facts.

From interviews to all informants and based on the data and information obtained by researchers when conducting research at the site, it can be concluded that the factors Cause Voter Participation in Tebing Tinggi District of Kepulauan Meranti Regency Year 2010-2015 seen from the following conditions are. First, Sociological conditions. This condition is associated sociological look at some aspects of the voters are divided into three parts, namely socio-economic factors, geographical factors, and ethnicity. Second, Psychological Condition. Instruments of this condition can be seen from the political beliefs of the candidates are divided into confidence and trust on the issue, as well as the political consciousness of the electorate is divided into autonomous participation and mobilization. Thirdly, options consisting Rational Choice Rational Fragmatis Idealists and options. Another factor that causes fluctuating voter participation is the difference the moment elections and election administrative and technical issues.

Keywords: Election, Participation, Fluctuation

Pendahuluan

Demokrasi langsung adalah suatu situasi dimana pemilih (konstituen) sekaligus menjadi legislator, artinya pemilih terlibat secara langsung dalam proses politik yang terjadi. Keterlibatan pemilih secara langsung itu disebut dengan istilah partisipasi politik yang dalam pengertian umumnya adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Dalam negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemilu merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal, pemilu bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.¹

Dengan demikian, pemilu menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan: *pertama*, memperbaiki kontrak sosial; *kedua*, memilih pemerintahan baru; dan *ketiga*, menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru.²

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Sistem pemilu digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil. Seperti yang

diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD*".

Pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah secara langsung dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya pembajakan otoritas dari rakyat oleh para wakil lembaga perwakilan.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah proses demokrasi yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam memberikan hak suaranya dalam memilih calon yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu: "*Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Pemilu Legislatif adalah proses demokrasi langsung oleh rakyat dalam memilih wakilnya yang akan menduduki jabatan-jabatan legislatif. Pemilihan legislatif terbagi menjadi 4 pemilihan yaitu Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: "*Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan*

¹Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2008, hlm. 5.

² *Ibid.*,

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Kepala Daerah dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis"*. Kemudian dilanjutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang berbunyi: *"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis"*.

Setiap warga negara yang ikut berpartisipasi politik memiliki berbagai

macam maksud dan tujuan yang masing-masing ada pada diri setiap individu, dikarenakan dengan mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan politik sekecil apapun yaitu salah satunya dengan melakukan partisipasi politik tentu saja sudah timbul dalam diri setiap warga negara akan kesadaran politik dalam dirinya. Adapun pengertian partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 dijelaskan pengertian partisipasi masyarakat yaitu *"Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan"*. Ketika suatu negara melakukan pemilihan umum untuk menentukan pemimpinnya, maka saat itu pula terjadi partisipasi dan keinginan rakyat untuk ikut terlibat dalam pemilihan umum tersebut. Dengan ikut serta dalam melakukan pemilu maka secara tidak langsung kita telah berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini. Dalam hal ini, keaktifan dan keikutsertaan masyarakat menjadi peran penting dalam pemilu.

Mengikuti Pemilu merupakan urusan pribadi, meskipun hal ini menyangkut urusan kenegaraan (publik). Ketika datang ke bilik-bilik suara, pilihan-pilihan yang dibuat juga merupakan dari masalah pribadi.³ Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

³ *Ibid.*, hlm. 127.

Menurut Milbrath dan Goel, terdapat 4 partisipasi politik berdasarkan kategori pelaku, yakni:⁴

1. Apatis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik.
2. Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu.
3. Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik.
4. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Khusus mengenai Apatis pada poin 1 di atas, dalam istilah pemilu di Indonesia juga sering disebut Golongan Putih (Golput), golongan ini adalah masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tetapi tidak mau memilih salah satu pilihan. Golput yang terjadi pada pemilu-pemilu belakangan juga disebabkan karena alasan-alasan politik, seperti kekecewaan terhadap pemerintah yang melahirkan sikap apatis, golput itu juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti faktor administratif dan teknis.⁵

Khusus mengenai Golput tersebut, di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengalami *trend* yang tinggi tingkat Golputnya. Berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilihan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2010
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013
3. Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015

Tabel di atas adalah rekapan data angka partisipasi pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada 5 pemilihan umum dalam 5 tahun terakhir. Dari data tabel dapat kita lihat terjadi naik-turunnya angka partisipasi pemilih yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Dari data pada beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemilihan Bupati lebih diminat dari Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Presiden.
2. Pemilihan Legislatif lebih diminati dari Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Presiden.
3. Pemilihan Gubernur paling kurang diminati dari Pemilihan Bupati, Pemilihan Legislatif, dan pemilihan Presiden.

Perbedaan partisipasi pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih jauh dan dituangkan dalam bentuk penelitian ilmiah, terlebih jika dikaitkan dengan perilaku pemilih dalam suatu wilayah tertentu.

Dari penjabaran latar belakang serta telah didukung oleh data-data di atas dapat diidentifikasi permasalahan dalam partisipasi pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2010-2015 yaitu terjadinya naik-turun (*inkonsistensi*) tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada pemilihan 5 tahun terakhir.

Perumusan Masalah

⁴ Jurnal Riset KPU Kepulauan Meranti

⁵ *Op.Cit.* Kacung Marijan, hlm. 127.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi fluktuasi partisipasi pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada pemilihan umum tahun 2010-2015?

Tinjauan Pustaka

1. Partisipasi Politik

Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.⁶

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya.⁷

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu

tersebut untuk berperan serta, dalam pencapaian tujuan organisasi.⁸

Jika pengertian partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi.⁹

Dilihat dari sifatnya, partisipasi dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu: *pertama*, partisipasi otonom atau mandiri, yaitu suatu bentuk partisipasi yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik. *Kedua*, partisipasi mobilisasi, termasuk didalamnya partisipasi seremonial, yaitu bentuk partisipasi yang digerakkan oleh orang atau kelompok tertentu, umumnya bagi negara berkembang dilakukan oleh kelompok elite tertentu, bukannya berangkat dari kesadaran masyarakat.¹⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah:

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik tempat ia hidup.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

⁷ *Ibid.*

⁸ Inu Kencana Syafii, *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*, (Jakarta: PT.Perca, 2003), hlm. 42.

⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 179.

¹⁰ *Op.Cit.* Siti Aminah, hlm. 135.

pemimpinnya, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

2. Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan bersangkutan.¹¹

Ada 3 teori perilaku memilih yaitu:¹²

1. *Party Identification Model*, yaitu teori yang berdasarkan kepada *sense of psychosocial* yang secara psikologis terkait dengan partai politik atau identifikasi psikologis berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya.
2. *Sociological Model*, yaitu pendekatan teori berdasarkan perspektif sosiologis. Keterkaitan antara model sosiologis dengan perilaku pemilih terhadap keanggotaan kelompok mengatakan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya dimana ia berada, terutama dalam kelompoknya.
3. *Rational-Choice Model*, yaitu alasan pilihan rasional berupa perhitungan tentang untung rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik.

Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku memilih, yaitu:¹³

¹¹ Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 87.

¹² P.Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 183.

¹³ Adman Nursal, *Political Marketing (Strategi Memenangkan Pemilu)*, (Jakarta:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menjelaskan karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok.

Model ini dikenal sebagai model perilaku memilih Mazhab Columbia. Menurut Mazhab Columbia, pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian, faktor agama, faktor geografis (kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi (khususnya di negara-negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih.

2. Pendekatan Psikologis

Mazhab Michigan menggarisbawahi adanya sikap politik yang para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orangtuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan orangtuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 54.

acuan seperti pekerjaan, kelompok pegajian, dan sebagainya.

3. Pendekatan Rasional

Pada kenyataannya, sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari suatu pemilu ke pemilu lainnya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Komunikasi politik, dengan substansi dan strategi yang tepat mungkin saja mempengaruhi pilihan seseorang.

Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari partai yang berkuasa kelak dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partai.

4. Pendekatan Marketing

Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh 7 domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

- 1) Isu dan kebijakan politik
- 2) Citra sosial
- 3) Perasaan emosional
- 4) Citra kandidat
- 5) Peristiwa mutakhir
- 6) Peristiwa personal
- 7) Faktor-faktor epistemik

Preferensi seorang pemilih seringkali terbentuk oleh lebih dari satu faktor yang satu sama lainnya saling meneguhkan. Kombinasi beberapa faktor tersebut dapat membentuk citra tertentu dalam benak para pemilih.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan Partisipasi pemilih pada pemilihan umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2015. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan Partisipasi pemilih pada pemilihan umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2015.

Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Fluktuasi Partisipasi Pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015

1.1. Kondisi Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang menentukan perilaku memilih berdasarkan instrumen dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi geografis atau wilayah tempat tinggal, dan etnis. Berikut penjelasan dari setiap kondisi yang disebutkan tadi.

1.1.1. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi bisa jadi merupakan penentu utama mengapa partisipasi masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi tidak konsisten, hal ini terjadi ketika demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang

positif terhadap masyarakat, maka yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada datang ke TPS untuk memilih.

Status sosial pemilih juga menentukan seorang untuk menjatuhkan pilihan dalam sebuah pemilihan. Hal ini disebabkan status sosial seseorang akan menentukan pilihan apakah pemilih tersebut adalah orang terpendang ataukah seseorang yang mempunyai ekonomi yang baik atau juga sebaliknya. Perilaku memilih seseorang terikat dalam lingkaran sosialnya, misalnya keluarga, rekan-rekan, tempat kerja dan lain sebagainya.

1.1.1.1. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pemilu. Misalnya saja masyarakat yang berpendidikan rendah ada yang tidak mau memilih karena ia menganggap pemilu tidak ada hubungannya dengan kehidupannya. Bahkan pemilu tidak mendatangkan efek terhadap keberlangsungan hidupnya. Masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya bekerja sebagai buruh harian ditempatkan tinggalnya. Pekerjaan yang tidak tetap membuat buruh tersebut terkadang harus ke luar daerah untuk mencari uang demi kebutuhan hidupnya. Rendahnya pendidikan juga membuat pemilih kekurangan informasi mengenai pemilu mulai dari kandidat-kandidat pemilu bahkan berita-berita tentang pemilu.

1.1.1.2. Pekerjaan

Pekerjaan calon pemilih juga menentukan sikap pemilih apakah ia akan menggunakan hak pilihnya atau justru lebih mementingkan pekerjaannya daripada harus memilih. Selain itu, terjadinya pergeseran kultur masyarakat desa yang dulunya paternalistik, dan tergantung pada pemimpinnya sekarang sudah tidak lagi

menempatkan pemimpin sebagai sesuatu yang paling pentingnya, artinya mencari uang adalah sesuatu yang lebih penting, ada proses pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang materialistik yang tengah terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi. Namun pada prinsipnya, ini kembali lagi sejauh mana pemimpin dapat meyakinkan masyarakat bahwa menggunakan hak suara adalah cara yang tepat untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas dan peduli dengan kondisi masyarakat.

1.1.2. Faktor Geografis

Wilayah tempat tinggal atau kondisi geografis seorang pemilih secara teoritik dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang untuk menentukan pilihannya atau tidak. Banyaknya masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi yang migrasi keluar daerah untuk bekerja, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bahkan ada juga yang ikut keluarga. Kondisi ini juga menjadi pemicu masalah rendahnya partisipasi karena adanya masyarakat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) justru mereka sedang tidak berdomisili di Kecamatan Tebing Tinggi.

1.1.2.1. Pemilih berdomisili ke luar daerah

Banyaknya masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi yang migrasi keluar daerah untuk bekerja, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bahkan ada juga yang ikut keluarga. Kondisi ini juga menjadi pemicu masalah rendahnya partisipasi karena adanya masyarakat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) justru mereka sedang tidak berdomisili di Kecamatan Tebing Tinggi.

1.1.3. Etnis

Pengaruh etnis juga mempengaruhi pilihan seseorang dalam memilih, hal ini

dikarenakan seseorang akan memilih yang berasal dari ras mereka sendiri. Pilihan ini dilatari keterikatan kesukuan yang begitu kuat dalam diri seseorang. Kesamaan suku antara pemilih dan kandidat juga menjadi faktor pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Adanya kesamaan suku ini pemilih beranggapan adanya ikatan kekeluargaan yang kuat antara pemilih dan kandidat.

Disisi lain pengaruh etnis juga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu disuatu tempat. Sebagai contoh masalah partisipasi politik Tionghoa sebagaimana diketahui masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi khususnya di Kota Selatpanjang memiliki kurang lebih 10.000 jiwa masyarakat yang beretnis Tionghoa. Adanya permasalahan ini justru menjadi suatu hal yang penting untuk segera diatasi mengingat banyaknya masyarakat Tionghoa di Kecamatan Tebing Tinggi.

1.2. Kondisi Psikologis

Sesuai dengan namanya kondisi psikologis merupakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap dalam menjelaskan perilaku memilih. Sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil (baik dilingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah) misalnya sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Melalui proses sosialisasi ini lah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik, yang berupa simpati terhadap partai politik. Ikatan psikologis inilah kemudian dikenal sebagai identifikasi partai (*party identification*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen psikologis berupa kandidat dan isu serta kepercayaan politik dan kesadaran politik.

1.2.1. Kepercayaan Politik

Kepercayaan seorang terhadap pemilu juga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini misalnya seseorang percaya bahwa dengan adanya pemilu akan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupannya. Mereka berharap dengan adanya pemilu tersebut akan terpilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyat dan mensejahterakan rakyat. Kepercayaan pemilih merupakan modal utama para kandidat untuk mendapatkan suara dari pemilih karena dengan adanya kepercayaan dari masyarakat maka mereka akan lebih mudah mempengaruhi masyarakat agar menjatuhkan pilihannya kepada kandidat tersebut. Sebagian masyarakat juga masih percaya dengan adanya pemilu ini akan terlahir pemimpin-pemimpin harapan rakyat dan mereka bisa memilih pemimpin mereka sendiri.

1.2.1.1. Kepercayaan Terhadap Kandidat

Memilih pemimpin merupakan tujuan dari demokrasi. Calon kandidat tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat sebagai pemilih yang terdaftar. Oleh karena itu seorang calon yang layak haruslah calon yang benar-benar memiliki pengaruh di masyarakat, calon yang memiliki karisma yang diyakini akan disambut positif masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat tersebut.

Kandidat atau calon sangat mempengaruhi dalam suatu pemilihan, oleh karena seorang pemilih akan memberikan suaranya jika kandidat yang dipilihnya memenuhi kriteria yang diinginkannya. Kriteria ini berbeda-beda di tiap pemilih, mereka memilih berdasarkan banyak pertimbangan. Bisa saja dari segi pendidikan kandidat yang akan dipilih, kemampuan memimpin, kemampuan berorganisasi,

ataupun dari segi yang lebih personal seperti berasal dari keluarga terpandang atau berasal dari etnis atau suku tertentu.

1.2.1.2. Kepercayaan Terhadap Isu

Isu atau kebijakan yang ditawarkan oleh seorang calon kepada pemilih juga sangat berpengaruh dalam pilihan masyarakat. Isu-isu yang berkembang dalam kampanye yang diberikan calon dapat berupa isu politik, ekonomi, pendidikan yang selanjutnya dianalisa oleh masyarakat apakah bisa diterima atau tidak. Pemilih akan merasa tertarik dengan isu atau janji-janji kampanye yang disampaikan langsung oleh calon atau melalui tim suksesnya. Pemilih dalam hal ini melihat bagaimana seorang kandidat mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan jika kelak menang, yang kemudian menjadi dasar program oleh kandidat atau calon.

1.2.2. Kesadaran Politik

Kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Sebagai warga negara sudah sepatutnya sadar bahwa berpartisipasi dalam pemilu itu merupakan kewajiban setiap warga negara dalam hal mewujudkan demokrasi yang baik yang dan berasal dari rakyat.

Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi. Seperti pada kasus pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan.

Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksi

kebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda. Kesadaran politik masyarakat sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya.

Kesadaran politik sangat berhubungan erat dengan partisipasi politik masyarakat. Ada dua bentuk partisipasi politik yang berkaitan dengan momen pemilu seperti saat ini, yaitu partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi.

1.2.2.1. Partisipasi Otonom

Partisipasi otonom adalah bentuk partisipasi yang lahir dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

1.2.2.2. Partisipasi Mobilisasi

Partisipasi mobilisasi adalah bentuk partisipasi yang digerakkan oleh orang atau kelompok tertentu kepada masyarakat dengan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal ini ialah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

1.3. Pilihan Rasional

Terdapat beberapa budaya politik, diantaranya adalah budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi, dimana suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya perilaku memilih demokratis.

Dalam pilihan rasional, pemilih diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Pilihan politik yang masyarakat ambil bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis, berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan pemilih, dimana memutuskan harus menentukan pilihannya dengan

pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan terbaik dan paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Pemilih dengan pendekatan pilihan rasional ini ditempatkan sebagai pemilih yang dapat mengantarkan untuk memilih pemimpin dianggap mampu membuat perubahan diantara beberapa pilihan calon. Hal ini selaras dengan tujuan pesta politik diarena demokrasi dimana pemilu merupakan tempat memilih pemimpin yang dapat mengantarkan ke arah perubahan yang lebih baik.

1.3.1. Pilihan Rasional Idealis

Jika kita berbicara tentang teori pilihan rasional yang ditinjau dari si pemilih, tentu hal ini berkaitan dengan pendekatan perilaku pemilih (*voting behavior*). Teori ini mengasumsikan bahwa setiap pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika ia akan memilih dalam pemilu, secara rasional ia bertindak tanpa memikirkan hal-hal atau pertimbangan lain apakah pemimpin yang ia pilih merupakan seagama dengannya, satu sukukah, atau lain sebagainya. Bagi si pemilih, jika ia tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang ia pilih maka ia tidak akan melakukan pemilihan dalam pemilu tersebut atau dengan kata lain ia akan lebih memilih golput. Ketika seseorang akan memilih kandidat saat pesta demokrasi berlangsung, ia memiliki pilihan-pilihan tertentu terhadap seorang pemimpin yang akan ia pilih nanti, pada saat itulah *cost-benefit* muncul dalam dirinya. Ia akan mengetahui resiko serta keuntungan seperti apakah yang kelak ia dapatkan jika ia memilih kandidat A, B, dan lain sebagainya.

3.2.3.2. Pilihan Rasional Pragmatis

Rasional pragmatis merupakan kebalikan dari idealis, jika idealis lebih menekankan atas kepentingan jangka panjang maka rasional pragmatis adalah sifat

yang didasari atas kepentingan dan keuntungan yang bersifat sementara. Dalam pemilihan umum mereka memilih atas dasar pilihan rasional, tetapi tidak dilatari keuntungan sesaat seperti kebanyakan taktik politik uang yang memberikan sejumlah uang untuk memilih kandidat yang ditentukan.

2. Faktor Lain Penyebab Terjadinya Fluktuatif Partisipasi Pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2010-2015

2.1. Perbedaan Momen Pemilu

Partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh momen pemilihan. Pemilihan legislatif yang dikenal memiliki keterikatan emosional secara langsung dengan pemilih, sedikit banyak akan menarik pemilih untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Di Kecamatan Tebing Tinggi juga demikian, pada Pemilihan legislatif tahun 2014 partisipasi pemilih mencapai angka 72,86% jauh berbeda dibandingkan dengan 4 momen pemilihan lainnya. Jadi setidaknya terdapat 2 alasan mengapa partisipasi Pemilihan Legislatif lebih tinggi dibandingkan dengan momen pemilihan lain di Kecamatan Tebing Tinggi, yaitu:

2.1.1. Kedekatan Emosional dengan Calon

Kedekatan emosional antara kandidat dan calon pemilih pada pemilihan legislatif menjadikan momen pemilu ini memiliki angka partisipasi yang cukup tinggi dibandingkan pemilihan lain. Selain itu, jumlah kandidat pada pemilihan legislatif yang terbilang ramai dibandingkan pemilihan lain juga menjadikan pemilihan

ini lebih diidamkan oleh calon pemilih dibandingkan pemilihan lain.

2.1.2. Tim Sukses (Pemenangan) terjun langsung ke lapangan

Artinya pada posisi ini tidak mengandalkan partisipan melainkan para tim sukses dan calon legislatif langsung mendatangi warga dengan harapan warga yang dapat Kartu Pemilih agar memilih pada hari pemilihan dengan tujuan meningkatkan suara bagi para kandidat. Alasan ini juga diperkuat dengan beberapa ungkapan dari informan yang saya temui dilapangan yang menyatakan bahwa peran tim sukses pada Pemilihan Legislatif sangat besar pengaruhnya tingkat partisipasi pada Pemilihan Legislatif.

2.2. Masalah Administrasi dan Teknis Pemilihan

Terkendalanya masalah administrasi dan teknis pemilihan juga merupakan penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi. Administrasi merupakan perihal utama bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan suaranya pada pergelaran pesta demokrasi rakyat tersebut.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi, persoalan administrasi dan teknis pemilihan juga merupakan permasalahan yang harus diperhatikan. Seperti yang terjadi pada beberapa pemilihan umum yang ada di kecamatan tersebut, masih ada masyarakat yang tidak dapat Kartu Pemilih yang digunakan untuk melakukan pemilihan di TPS. Lemahnya pendataan dari petugas setempat dan juga masalah data yang tidak valid sehingga masyarakat merasa dirugikan karena hak politiknya harus terbuang sia-sia karena mereka menganggap jika tidak memiliki Kartu Pemilih berarti mereka tidak

terdata sebagai pemilih dan mereka pun menjadi malas untuk datang ke TPS. Dari beberapa narasumber yang saya wawancarai dilapangan, ada beberapa narasumber yang menyatakan tidak dapat Kartu Pemilih dari petugas setempat yang membuat warga tersebut menjadi malas untuk datang ke TPS karena tidak memiliki Kartu Pemilih.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih dan menjatuhkan pilihan untuk tidak memilih bukanlah tanpa tujuan. Perilaku tidak memilih sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol atas berbagai bentuk protes politik yang tidak tersuarakan. Perilaku tidak memilih bagi para pelakunya bisa merefleksikan berbagai pesan.

Catatan penting yang perlu diungkap lebih jauh bahwa ternyata perilaku tidak memilih di Kecamatan Tebing Tinggi tidak disebabkan bahwa sistem pemilihan yang tidak demokratis atau tidak mempresentasikan kepentingan mereka. Pemahaman informan tentang sistem pemilihan yang demokratis adalah masyarakat ikut dilibatkan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Beberapa sumber menyatakan bahwa ada kesalahan teknik pada panitia, dimana pada awal pemungutan suara, pemilih yang data setelah mendaftarkan diri dipersilahkan untuk menunggu dan setelah dipanggil baru diberi surat suara untuk kemudian menuju bilik suara dan seterusnya. Prosedur pemanggilan ini yang kemudian menjadikan penumpukan pemilih hingga kemudian pemilih harus menunggu lama untuk memberikan suaranya dibilik suara. Banyaknya pemilih yang harus mengantri ini kemudian membuat pemilih yang baru datang malas memberikan suara dan memutuskan untuk pulang.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terletak pada persoalan perilaku memilih warga yang buruk. Akan tetapi,

permasalahan administrasi dan teknis pemilihan yang terkadang mempersulit dan memperlambat juga membuat masyarakat membatalkan niat untuk menyalurkan hak politiknya.

Kesimpulan

Faktor-faktor Penyebab Partisipasi Pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015 dilihat dari beberapa kondisi berikut ini yaitu. *Pertama*, Kondisi Sosiologis. Kondisi ini melihat beberapa aspek terkait sosiologis pemilih yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu faktor sosial ekonomi, faktor geografis, dan etnis. *Kedua*, Kondisi Psikologis. Kondisi psikologis merupakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap dalam menjelaskan perilaku memilih. Pada kondisi ini melihat ketertarikan dan kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihannya. Instrumen dari kondisi ini dapat dilihat dari kepercayaan politik yang terdiri dari kepercayaan terhadap isu dan kepercayaan terhadap kandidat dan kesadaran politik dari pemilih yang dilihat dari partisipasi otonom dan mobilisasi. *Ketiga*, Pilihan Rasional. Dalam pilihan rasional, pemilih diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Pilihan politik yang masyarakat ambil bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis, berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan pemilih, dimana memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan terbaik dan paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Pemilihan rasional dapat dibagi menjadi dua yaitu pilihan rasional pragmatis dan pilihan rasional idealis.

Faktor Lain Penyebab Terjadinya Fluktuatif Partisipasi Pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2010-2015 yaitu *Perbedaan Momen Pemilu*. Perbedaan Momen Pemilu kerap kali menjadi salah satu penyebab naik turunnya angka partisipasi pemilih. Seperti pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Legislatif memiliki angka persentase pemilih yang tinggi dibandingkan pada pemilihan lainnya karena dilihat dari kedekatan emosional antara calon dan pemilih serta tim sukses yang terjun langsung ke lapangan. *Kedua, Masalah Administrasi dan Teknis Pemilihan*. Permasalahan Administrasi dan Teknis Pemilihan kerap kali menjadi pemicu pemilih enggan menggunakan hak pilihnya. Di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi, persoalan administrasi dan teknis pemilihan juga merupakan permasalahan yang harus diperhatikan. Seperti yang terjadi pada beberapa pemilihan umum yang ada di kecamatan tersebut, masih ada masyarakat yang tidak dapat Kartu Pemilih yang digunakan untuk melakukan pemilihan di TPS. Lemahnya pendataan dari petugas setempat dan juga masalah data yang tidak valid sehingga masyarakat merasa dirugikan karena hak politiknya harus terbuang sia-sia karena mereka menganggap jika tidak memiliki Kartu Pemilih berarti mereka tidak terdata sebagai pemilih dan mereka pun menjadi malas untuk datang ke TPS.

Saran

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepulauan Meranti yang dalam hal ini adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum hendaknya membenahi pendataan calon pemilih serta administrasi dengan baik sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dikecewakan dengan hilangnya peluang mereka dalam menggunakan hak politiknya pada pemilihan umum.

2. Isu atau janji-janji kampanye yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya ditepati dan dipenuhi agar masyarakat pemilih menjadi percaya dan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh setiap kandidat yang terpilih sehingga tidak timbul rasa kecewa dalam masyarakat yang memilih kandidat yang mereka pilih dalam pemilihan umum.
3. Pemerintah Kepulauan Meranti dalam hal ini hendaknya menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga masyarakat tidak perlu bermigrasi bekerja keluar daerah yang mengakibatkan turunnya partisipasi pemilih ketika pemilihan umum berlangsung karena masyarakat yang bermigrasi tidak berada dilokasi dan mereka juga tidak dapat memilih didaerah tempat mereka bermigrasi.

Daftar Pustaka

Daftar Bacaan:

- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Faturohman, Deden dan Wawan Sobari. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Firmanzah. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Husaini, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008.
- Kencana Syafiie, Inu. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*. Jakarta: PT.Perca, 2003.
- Mariana, Dede dan Caroline Paskarina. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca - Orde Baru)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nursal, Adman. *Political Marketing (Strategi Memenangkan Pemilu)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Sitepu, P.Anthonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Peraturan Perundangan-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4)
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Pemilu

Sumber Lainnya:

- Jurnal Riset KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
- Skripsi, R.Arnaldo, *Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 (Studi Kasus Etnis Jawa Di Kecamatan Singingi)*.
- Skripsi, Arianto Azis, *Perilaku Politik Tidak Memilih Masyarakat di Kecamatan Tampan dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011*.

<http://id.m.wikipedia.org>

<http://id.expresisastra.blogspot.com>